

Kronisme, Korupsi, dan Militerisme di Era Orde Baru

Dewik Untarawati
Universitas Jember
Dewik@unej.ac.id

Article Info

Keywords:
Korupsi, Kronisme,
Militerisme, Soeharto, Orde
Baru

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan tentang struktur dan penyebab korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dengan fokus utama adalah peran militer dalam upaya untuk melanggengkan praktik-praktik KKN selama pemerintahan Orde Baru berlangsung. Banyak tulisan yang membahas tentang KKN yang dilakukan oleh Soeharto dan kroni-kroninya selama berkuasa namun, pembahasannya hanya dilakukan secara terpisah. Tulisan ini mencoba untuk mengintegrasikan ketiga aspek tersebut (korupsi, kronisme, dan militerisme) dalam satu kerangka analisis yang komprehensif. KKN yang telah melembaga selama pemerintahan Orde Baru di pengaruhi kuat oleh faktor militer dan politik. Secara militer, kebijakan Dwifungsi ABRI yang menjangkau tidak hanya aspek militer, namun juga aspek politik dan ekonomi telah mendorong praktik-praktik KKN menjadi lebih luas. Secara politik, dilihat dari pembentukan Lembaga Staf Pribadi (Spri) dan Asisten Pribadi (Aspri) serta arah kebijakan politik Soeharto yang pro barat juga mendorong terjadinya praktik KKN. Tulisan ini ditulis dengan menggunakan metode penelitian sejarah dengan sumber pendukung berupa surat kabar, jurnal, dan buku. Tulisan ini mengungkap bahwa interaksi antara kekuasaan militer dan politik mendorong berkembangnya praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme selama masa pemerintahan Orde Baru.

Pendahuluan

Korupsi, kronisme, militerisme merupakan ungkapan yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah rezim yang memerintah paling lama yakni, rezim Orde Baru. Pemerintahan Orde Baru menjadi pemerintahan yang kontroversial dalam sejarah Indonesia. Bagaimana tidak, pada awal pemerintahannya, Soeharto sudah melakukan upaya-upaya untuk melanggengkan kekuasaannya dengan membentuk beberapa institusi yang tujuannya akan dijadikan sebagai pendukung pemerintahan yang baru dijalankan tersebut. Salah satu lembaga yang dibentuk untuk tujuan tersebut adalah lembaga Staf Presiden (Spri) yang kemudian diganti dengan Asisten Presiden (Aspri). Lembaga tersebut dibentuk beberapa bulan setelah Soeharto menjabat sebagai Presiden. Keberadaan lembaga tersebut ternyata disalahgunakan dimana lembaga tersebut tidak hanya ditujukan untuk membantu tugas presiden, namun lebih menyerupai suatu kroni yang melibatkan orang-orang kepercayaan Soeharto (*Soeharto Inner Circle*)

yang diberikan wewenang tidak terbatas untuk menjalankan setiap tugasnya. Sehingga, lembaga tersebut lebih banyak melakukan penyimpangan-penyimpangan seperti misalnya, menyuburkan korupsi yang dilakukan oleh presiden, keluarga presiden, sekaligus juga orang-orang yang berada di lingkaran dalam presiden. Lalu apa hubungan antara kronisme, korupsi, dan militerisme? Seperti yang telah diketahui khalayak umum, masyarakat menilai pemerintahan Orde Baru merupakan pemerintahan militeristik. Melalui kebijakan Dwifungsi ABRI yang memberikan keleluasaan bagi militer untuk menjalankan tidak hanya fungsi pertahanan dan keamanan (Hankam), namun juga memberikan akses untuk menjalankan fungsi ekonomi, sosial, dan tentu saja politik, menjadikan Indonesia sebagai negara yang dikendalikan oleh militer. Dominasi fungsi kenegaraan yang dijalankan oleh pemerintahan Orde Baru dibawah kendali militer tersebut mengakibatkan timbulnya korupsi. Terlebih lagi pembentukan Asisten Presiden yang dimasukkan dalam kroni Soeharto semakin memperkuat penyelewengan-penyelewengan tersebut. Melalui akses yang tidak terbatas, orang-orang dalam presiden satu per satu turut mengambil bagian dalam menjalankan perusahaan-perusahaan milik negara. Mereka diberikan keleluasaan dalam mengelola dan mengatur perusahaan, termasuk juga keleluasaan dalam mengambil kebijakan yang menyangkut keuangan perusahaan. Hal tersebut membuat mereka dengan sesuka hati melakukan apa saja yang mereka inginkan, salah satunya adalah korupsi. Tulisan ini akan membahas mengenai bagaimanakah awal terbentuknya kroni-kroni Soeharto hingga menyebabkan timbulnya tindakan korupsi dan siapa saja yang masuk dalam daftar kroni Soeharto?. Kemudian faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya tindakan korupsi pada masa pemerintahan Soeharto?

Kronisme dan Korupsi Orde Baru

Sebagai pendahuluan untuk menelusiri jejak korupsi Orde Baru melalui pemerintahan Soeharto, maka terlebih dahulu perlu mengetahui latar belakang Soeharto sebagai pengumpul uang (*fundraising*) sebelum menjabat menjadi presiden. Selama karirnya di dunia militer, khususnya Ketika beliau menjadi Kepala Divisi Diponegoro di Yogyakarta, terdapat kebijakan di dinas kemiliteran yang memberikan keleluasaan atas penggunaan properti milik negara bagi pegawai militer dalam rangka mendukung keuangan untuk memenuhi kebutuhan militer. Selain itu mereka juga diizinkan untuk melibatkan diri dalam transaksi bisnis yang tujuannya juga untuk mendukung pendanaan militer. Namun kebijakan tersebut disalahgunakan oleh beberapa pegawai militer dimana beberapa diantara mereka menggunakan properti milik negara tidak untuk kepentingan militer, namun sebaliknya dipergunakan untuk kepentingan pribadi, tidak terkecuali oleh Presiden Soeharto. Pada pertengahan tahun 1949,

beliau dan koleganya di Dinas Angkatan Darat mendirikan bengkel dan perusahaan angkutan bis dan truk. Bisnis tersebut ditujukan untuk menciptakan lapangan pekerjaan untuk pejuang atau prajurit gerilya yang telah dibubarkan sebelumnya sehingga mereka dapat mendapatkan pekerjaan kembali. Pada saat itu, dua orang tersebut (Soeharto dan satu koleganya di dinas kemiliteran) telah memiliki 1 truk, 1 bus, dan 2 sedan yang mana semua kendaraan tersebut telah dipergunakan untuk tujuan-tujuan militer. Mereka juga memiliki peralatan perbengkelan lengkap yang menjadi modal negara yang tidak ternilai harganya yang didapatkan dari hasil pampasan perang Jepang. Namun ternyata bisnis tersebut dijalankan untuk memenuhi kepentingan pribadi mereka. Kedua orang tersebut membagi keuntungan yang didapatkan dari bisnis tersebut dan tidak pernah berfikir untuk mengembalikan uang tersebut untuk kepentingan Angkatan Darat. Banyak pihak-pihak yang tidak setuju dengan apa yang telah dilakukan oleh Soeharto mengenai bagaimana cara Soeharto mengumpulkan uang untuk kepentingan dirinya sendiri, bukan kepentingan Angkatan Darat. Mereka yang tidak setuju dan mengklaim bahwa tidak semua uang yang telah digunakan dan dihasilkan tersebut dilaporkan. Artinya bahwa ada sebagian uang yang tidak dilaporkan yang mana dipergunakan untuk kepentingan pribadi presiden. Hal tersebut juga menjadi perhatian Sultan Yogyakarta yang juga tidak setuju dengan cara yang dilakukan oleh presiden.¹ Lalu pertanyaannya, mengapa pihak-pihak yang tidak setuju tidak berani menentang atau memberontak secara langsung melihat hal-hal tidak wajar telah dilakukan oleh presiden? Menurut analisa saya, posisi presiden yang ketika itu menjabat sebagai Komandan tentu saja memiliki wewenang yang lebih besar di dinas Angkatan Darat. Sedangkan para penentangannya hanya melakukan kecaman secara pasif atau tidak berani melakukan perlawanan dikarenakan posisi atau jabatan yang dimiliki lebih rendah sehingga tidak memiliki kekuatan untuk melakukan kecaman secara langsung. Nada-nada sinis juga masih terdengar diantara pihak-pihak yang tidak setuju, nampak terlihat ketika di akhir tahun 1965 dan awal tahun 1966 dimana terdapat pihak-pihak yang mendukung Soeharto untuk menjadi Presiden Indonesia daripada A.H.Nasution. Setidaknya ada 3 tanggapan yang semuanya bernada negatif dengan menuduh Soeharto sebagai seorang pencuri dan merupakan orang yang hanya mementingkan kepentingannya sendiri.

Setelah Soeharto berhasil menggantikan Soekarno sebagai presiden, Soeharto kemudian melakukan beberapa transformasi yakni diantaranya pertama, mengubah politik luar negeri yang pada masa orde lama bersifat

¹Edward Aspinall, Greg Fealy, *Soeharto's New Order and Its Legacy*, dengan judul bab "One Reasonably Capable Man : Soeharto's Early Fundraising" oleh David Jenkins (Sydney : ANU Press, 2010), hlm 19.

tertutup, menjadi terbuka dengan dunia luar, khususnya negara-negara Barat liberal. Kedua, membentuk orang-orang kepercayaan yang tergabung dalam kelompok inti dan kelompok dalam. Seiring dengan berjalannya waktu, kelompok tersebut menjadi kroni-kroni Soeharto yang bersama-sama melakukan korupsi. Rajeswary Brown dalam artikelnya berjudul, "*Indonesian Corporations, Cronysm, and Corruption*" mengklasifikasikan pihak-pihak yang diidentifikasi menjadi kroni-kroni Soeharto meliputi berbagai macam dimensi yakni, presiden, keluarga inti presiden, birokrasi, militer, kapitalis Cina, kapitalis pribumi, perusahaan milik negara khususnya, Pertamina, Bulog, dan Berdikari. Infrastruktur resmi, pengadilan, legislasi yang berkaitan dengan perusahaan. Selain itu kroni-kroni Soeharto yang juga sama pentingnya adalah agen-agen asing, investor asing, Bank Dunia, IFC, serta lembaga asuransi yang bersifat rahasia untuk pasar-pasar modal asing.²

Kroni-kroni Soeharto khususnya, pihak-pihak yang berada di lingkaran inti dan dalam Soeharto diberikan kedudukan di pemerintahan. Kedudukan di pemerintahan paling banyak diberikan kepada kolega-koleganya di Angkatan Darat sebelumnya. Sangat nampak bahwa Soeharto memang menginginkan urusan kenegaraan ditangani oleh kelompok militer. Hal tersebut merupakan penyimpangan awal yang dilakukan oleh Soeharto di lingkungan pemerintahan karena susunan kabinet sangat kental dengan unsur KKN. Beberapa diantara kolega Soeharto di dinas militer antara lain, Maraden Panggabean yang diberikan jabatan sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan sekaligus merangkap sebagai Panglima ABRI. Amir Machmud sebagai Menteri Dalam Negeri, kemudian Yoga Sugama diberi jabatan sebagai Kepala Bakin, Ali Murtopo sebagai ketua OPSUS (Operasi Khusus), Laksamana Sudomo sebagai Panglima Kopkamtip, Benny Moerdani sebagai Wakil Intelijen Menteri Pertahanan, Letjen Soedarmono sebagai Menteri Sekretariat Negara, Letjen Daryatmo sebagai Kepala Staf urusan nonmiliter Menteri Pertahanan, dan Ibnu Sutowo sebagai Direktur Pertamina.³ Pembagian kekuasaan kepada kroni-kroni Soeharto telah berlangsung hingga menjelang akhir kekuasaannya. David Jenkins menyatakan bahwa hampir semua menteri-menteri Orde Baru merupakan kroni-kroni Soeharto, bahkan dari sekian banyak jumlah menteri terdapat anak Soeharto sendiri, diantaranya Siti Hardiyanti Indra Rukmana (Tutut) sebagai Menteri Sosial. Sedangkan menteri perindustrian dan perdagangan dijabat oleh Bob Hasan, yang tidak lain adalah teman karib dan

²Rajeswary Ampalavanar Brown, *Indonesian Corporations, Cronysm, and Corruption* dalam *Modern Asian Studies* (40) (4), 2006, hlm 954.

³David Jenkins, *Soeharto dan Barisan Jenderal ORBA : Rezim Militer Indonesia 1975-1983*, (Depok : Komunitas Bambu, 2010), hlm 26.

teman bisnis Soeharto. Jabatan strategis Menteri Dalam Negeri dipercayakan oleh R. Hartono yang sangat dekat dengan Tutut dan loyal dengan Soeharto. Jabatan Menhankam dipercayakan oleh mantan ajudannya yakni, Wiranto. Kemudian jabatan Menteri Keuangan diberikan oleh Faud Bawazir yang memiliki hubungan dekat dengan anak-anak Soeharto terutama ketika ia menjabat sebagai Dirjen Pajak, Soeharto memberikan bebas pajak pada industri mobil nasional yang tidak lain adalah milik Hutomo Mandala Putra.⁴ Selain tindakan nepotisme dengan cara mendistribusi kekuasaan kepada orang-orang di lingkaran dalam, Soeharto dan kroni-kroninya juga melakukan Korupsi lainnya yang kemudian saya klasifikasikan menjadi 3 yakni, Korupsi dikalangan keluarga inti Soeharto yang meliputi (istri, anak, saudara, dan kerabat dekat), Korupsi dikalangan Militer, dan Korupsi dikalangan kapitalis Cina,

Korupsi dikalangan keluarga Inti

Korupsi yang dilakukan oleh Soeharto di kalangan keluarga inti meliputi istri, anak, saudara dan kerabat dekat. Soeharto diketahui telah mendirikan kerajaan bisnis yang dikelola oleh keluarganya. Bisnis yang didirikan tersebut utamanya meliputi bidang industri baru seperti media, telekomunikasi, transportasi, dan infrastruktur yang kemudiian dibagi kedalam beberapa bidang seperti perdagangan, keuangan, otomotif, kimia, obat-obatan, pertambangan, konstruksi, agribisnis, dan perbankan. Beberapa perusahaan yang didirikan oleh keluarga Soeharto antara lain :

Kerajaan Bisnis Soeharto		Anak Perusahaan
1.	Humpuss Group	Bank Utama
		Sempati Air
		17 perusahaan
2.	Usaha Mulia Group	Tirtamas
		Semen Cibinong
3.	Hanurata Group	Trias Sentosa
		18 perusahaan

⁴A. Malik Haramain, *Gus Dur, Politik, dan Militer*, (Bantul: LKIS Yogyakarta, 2004), hlm 84.

4.	Mercu Buana Group	Kedaung Group
		11 Firms
5.	Bank Central Asia	
6.	Citra Lamtoro Group	Bank Yama
		TPI
		Citra Marda
		Persda Tollroad
		Bob Hasan Group
7.	Indomobil	
8	Bimantara Group	Andromeda
		Tripolyta
		8 perusahaan
9.	Salim Group	262 perusahaan

Sumber : *Public Policy for Privatesector No.195 Tahun 1999*, Stijn Claessens, Simeon Djankov, dan H.P.Lang, "Who Controls East Asian Corporations and the Implications for Legal Reforms"

Mayoritas perusahaan-perusahaan tersebut merupakan gabungan antara modal-modal asing seperti misalnya Bimantara memiliki 2 partner bisnis yakni : Alcatel Telecom dan Scope Trade Malaysia. Kemudian di bidang Automobile juga memiliki 2 partner utama yakni Hyundai dan Ford. Kemudian perusahaan lainnya yakni, Humpuss Group didirikan oleh Hutomo Mandala Putra dan Sigit Harjojudanto yang bergerak dibidang manufaktur dan komponen penerbangan. Telekomunikasi, pelayaran, penerbangan charter, dan konstruksi. Selain itu, anak Soeharto yang lain yakni, Tutut juga menangani perusahaan transportasi dan infrastruktur. Perusahaan keluarga Soeharto dikelola tidak hanya oleh anak-anaknya, adik tiri Soeharto, Probosutedjo, sepupu Soeharto, Sadwikarmono juga mendapatkan bagian.⁵ Tidak hanya itu, istri Soeharto Siti Suhartienah (Ibu Tien) juga ikut dalam kegiatan bisnis yang dijalankan keluarganya. Bahkan Tien Soeharto seringkali dikenal sebagai *Tien percent*

⁵Rajeswary Ampalavanar Brown, *Indonesian Corporations, Cronysm, and Corruption* dalam Modern Asian Studies, hlm 972-979.

dikarenakan keterlibatannya dalam beberapa kasus korupsi dan penyelundupan, salah satunya adalah korupsi atas mega proyek TMII dan juga keterlibatannya dalam kejahatan bisnis bersama dengan pengusaha Tionghoa di Jakarta, Palembang, Padang, Medan, dan Kota Raja di Aceh tahun 1970.⁶

Korupsi di Kalangan Militer

Disini saya akan menjelaskan intervensi militer yang begitu besar terhadap 3 perusahaan milik negara yakni, Pertamina, Bulog, dan Berdikari. Pertama, Pertamina yang dikendalikan oleh Ibnu Sutowo melalui kuasa yang diberikan Soeharto telah berhasil menyumbangkan 1/3 pendapatan negara dari hasil ekspor minyak, kemudian jumlah tersebut meningkat menjadi 2/3 pada tahun 1973 ketika terjadi bonanza minyak. Bonanza minyak yang terjadi tidak hanya menguntungkan segelintir elit yang memegang kendali Pertamina, namun pendapatan minyak yang sangat besar tersebut juga dipergunakan untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Seperti misalnya dinaikannya gaji pokok semua pegawai pemerintah hampir 3 kali lipat, dan 5 kali lipat untuk golongan tertentu seperti guru. Di bidang pendidikan, terjadi pembangunan 6000 sekolah dan pengangkatan 58.000 guru. Dinaikannya anggaran bantuan daerah sebesar 60%, peningkatan jumlah subsidi yang bertujuan untuk mencegah peningkatan pada harga beras, . bensin, dll, peningkatan di bidang pertanian dan irigasi mencapai 80%, hingga pembangunan berbagai infrastruktur seperti jalan, pusat kesehatan, air minum, hingga proyek penghijauan dan penghijauan.⁷

Sementara itu, pertumbuhan minyak dari tahun 1968-1975 juga didukung oleh perusahaan Shell dari Amerika, dan perusahaan Jepang Mitsubishi, Caltex Mobil, dan Stanvac yang merupakan *joint-venture* (gabungan) dari hasil kerjasamanya dengan Pertamina. Pada tahun 1975, setidaknya terdapat 35 perusahaan minyak yang bekerjasama dengan Pertamina. Hal inilah yang menjadi pusat munculnya korupsi yang merajalela dibawah Direktur Pertamina, Ibnu Sutowo.⁸ Ketika itu, pemerintah pusat mengetatkan pengawasan operasi Pertamina, khususnya pinjaman jangka panjang luar negeri. Melihat situasi tersebut, Ibnu Sutowo beralih pada pinjaman jangka pendek luar negeri dengan maksud agar pinjaman tersebut dapat dilunasi dari tahun ke tahun.⁹ Pinjaman

⁶David Jenkins, *Soeharto dan Barisan Jenderal ORBA : Rezim Militer Indonesia 1975-1983*, (Depok : Komunitas Bambu, 2010), hlm 331.

⁷H.W.Arndt, *Pembangunan dan Pemerataan Indonesia di Masa Orde Baru* (Jakarta : LP3ES, 1983), hlm 103.

⁸Rajeswary Ampalavanar Brown, *Indonesian Corporations, Cronyism, and Corruption* dalam *Modern Asian Studies*, hlm 963.

⁹H.W.Arndt, *Pembangunan dan Pemerataan Indonesia di Masa Orde Baru*, hlm 105.

tersebut digunakannya untuk membeli dan mencharter tanker serta digunakan untuk keperluan industri baja (PT.Krakatau Steel) yang dibelinya tahun 1970. Sekaligus industri properti di Batam. Pada tahun 1975, hutang Pertamina menumpuk menjadi US\$ 10 juta atau setara dengan 30% GDP Indonesia. Korupsi yang dilakukan oleh Sutowo adalah Penggunaan uang Pertamina untuk kepentingan bisnis pribadinya yakni Nugra Santana yang didirikan tahun 1969 yang bergerak di bidang perhotelan, distribusi automobil, pelayaran, galangan kapal, hingga bidang teknik. Semua aktivitas bisnis Nugra Sentana yang disebutkan tadi dikaitkan dengan keuangan Pertamina. Dalam menjalankan Pertamina, Ibnu Sutowo juga bekerjasama dengan Sjarnobi Said (pemilik bisnis dari kelompok militer) dan Mohamad Jusuf.¹⁰

Selain Pertamina, BULOG dan Berdikari juga ditengarai menjadi bisnis para militer yang syarat dengan korupsi. BULOG (Badan Urusan Logistik) didirikan tahun 1966 merupakan perusahaan milik negara yang bergerak dibidang perdagangan. Perusahaan ini berperan dalam memonopoli pembelian dan pendistribusian komoditas-komoditas penting. Pembelian komoditas-komoditas melalui pedagang cina perantara yang kemudian dijual kembali melalui konglomerat-konglomerat Cina (Salim). Dalam hal ini Bank Sentral memiliki pengaruh besar dalam membiayai pembelian-pembelian komoditas, saham negara, sekaligus penjualan. Perusahaan ini telah memberikan keuntungan yang sangat besar bagi jenderal-jenderal AD kelas atas dan tentu saja konglomerat Cina yang syarat dengan praktik korupsi. Sama seperti BULOG, Berdikari juga merupakan perusahaan dagang negara yang didominasi oleh kelompok militer AD melalui kerjasamanya dengan pedagang-pedagang Cina dan perusahaan Multinasional Taiwan.¹¹

Korupsi di Kalangan Kapitalis Cina

Sejak awal pemerintahan Orde Baru, ekonomi Indonesia ditandai dengan peningkatan konsentrasi kapitalis-kapitalis Cina yang dapat dilihat dari aktifitas-aktifitas mereka dalam mencari sewa (*rent-seeking*) hingga menyentuh tataran perusahaan negara. Menurut Rajeswary, aktivitas para kapitalis Cina di Indonesia pada saat itu telah membuat menurunnya perusahaan-perusahaan pribumi, dan sebaliknya semakin memperkaya konglomerat-konglomerat Cina. Masuknya para kapitalis Cina bersamaan dengan Malaysia, Thailand, Singapore, dan Hongkong telah memantapkan posisi mereka di Indonesia yang diklaim sebagai salah satu faktor pendukung tumbuhnya perekonomian di Indonesia

¹⁰Rajeswary Ampalavanar Brown, *Indonesian Corporations, Cronyism, and Corruption* dalam *Modern Asian Studies*, hlm 963-964.

¹¹Rajeswary Ampalavanar Brown, *Loc.Cit.*

melalui investasi dan bantuan luar negeri yang diterima oleh Indonesia. Disisi lain, kapitalis-kapitalis Cina tersebut juga memberikan permasalahan bagi perusahaan-perusahaan pribumi yang baru berdiri. Mereka menjadi semakin bergantung pada kapitalis Cina dan membuat pribumi hanya sebagai pelanggan para kapitalis Cina. Hal tersebut memicu pengahacuran secara nyata di tahun 1997. Berdasarkan data yang diperoleh dari Direktorat Pasar Modal Indonesia, 5 tahun terakhir sebelum terjadinya krisis moneter tahun 1997 dimana pasar modal telah didominasi oleh perusahaan-perusahaan Cina. Pada tahun 1993, sebanyak 72,7% saham di Indonesia dimiliki oleh perusahaan Cina, menjadi 68,3 di tahun 1994 dan 68,7 ditahun 1995. Jumlah tersebut turun menjadi 67,5 ditahun 1996 dan 1997.¹² Walaupun jumlahnya menurun, namun perusahaan Cina tetap mendominasi saham keseluruhan di Indonesia karena jumlahnya melebihi 50 %.

Beberapa orang yang ditengarai memiliki hubungan dekat bahkan kerap disebut sebagai kroni Soeharto adalah Liem Sioe Liong. Liem merupakan cukong pribadi Soeharto yang bertindak sebagai perantara. Kedekatan Soeharto dengan Liem terkait dengan bisnis yang ingin dijalankan Soeharto yakni bisnis minyak senilai 850 miliar Dollar AS dimana dalam bisnis tersebut, Liem bertindak sebagai perantara.¹³ Selain Liem Sioe Liong, kroni Soeharto yang berasal dari keturunan Tionghoa dan memiliki hubungan dekat dengan Soeharto adalah Bob Hasan dan Eddy Tanzil. Bob Hazan bahkan telah menjalankan beberapa perusahaan besar baik yang ditengarai menjadi perusahaannya sendiri maupun perusahaan hasil hubungan kerjasama dengan keluarga Soeharto. Sementara Eddy Tanzil yang sempat menjadi pemberitaan yang ramai dibicarakan telah menerima surat sakti dari pejabat tinggi pemerintahan yakni Menko Polkam, Soedomo atas persetujuan Menteri Keuangan yakni, Dr. Sumarlin. terkait dengan pemberian kredit yakni sekitar US\$ 427 juta. Lalu pertanyaannya, mengapa begitu mudahnya negara memberikan kredit sebesar itu terhadap perusahaan yang belum jelas bonafiditasnya ?. Alasan yang diberikan Soedomo waktu itu adalah lebih baik Eddy Tanzil memperbesar usahanya di Indonesia daripada di Cina. Setelah Eddy Tanzil mendapatkan modal dari pemerintah ia menyalahgunakan bantuan tersebut dan membuat dia harus dipenjara. Beberapa orang tersebut merupakan orang keturunan tionghoa yang berhasil membangun kejayaan bisnis mereka berkat kedekatannya dengan Soeharto.¹⁴ Kedekatan pengusaha Cina dengan Soehartoi tidak terjadi begitu

¹²Rajeswary Ampalavanar Brown, *Op.Cit.*, hlm 959-960.

¹³David Jenkins, *Soeharto dan Barisan Jenderal ORBA : Rezim Militer Indonesia 1975-1983*, (Depok : Komunitas Bambu, 2010), hlm 214.

¹⁴George Junus Aditjondro, *Korupsi Kepresidenan : Reproduksi Oligarkhi Berkaki Tiga Istana, Tangsi, dan Partai*

saja, namun jauh sebelum Soeharto menjadi presiden, beberapa pengusaha Cina telah menjalin hubungan yang intens dengan Soeharto seperti Liem Sioe Liong telah menjadi pemasok kebutuhan tentara Divisi Diponegoro di masa Soeharto menjadi Panglima Divisi Diponegoro. Bob Hasan (The Kian Seng) adalah teman akrab Soeharto yang kerap menemani Soeharto bermain golf.¹⁵

Faktor-Faktor Penyebab Korupsi

1. Dwifungsi ABRI

Berkembangnya korupsi di kalangan militer dimulai setelah diberlakukannya kebijakan dwifungsi ABRI di awal pemerintahan Orde Baru. Ketika itu, ABRI menjadi kekuatan dominan dari pemerintahan Orde Baru, dimana hampir semua pejabat pemerintahan mulai dari presiden, menteri, sekjen maupun dirjen berasal dari kalangan militer. Pada tahun 1960-an dan 1970-an, hampir semua gubernur, bupati/walikota berasal dari ABRI. Ditambah juga peranan Kopkamtib dan juga Opsus cukup besar pada waktu itu. Partai-partai politik juga semakin kurang berpengaruh dan mengalami intervensi Opsus agar pemimpin-pemimpin partai lainnya dipastikan tidak akan mengganggu stabilitas politik. Dalam upaya melegitimasi peranan ABRI dalam dwifungsi ABRI, ditegaskan bahwa tentara Indonesia berbeda dengan tentara-tentara dari negara lain. Di Indonesia, tentara memiliki misi khusus yakni, tidak hanya dibidang militer, namun juga di bidang ipoleksosbud, yang meliputi semua bidang yang penting bagi kelangsungan hidup negara, termasuk di dalamnya mencakup fungsi sipil.¹⁶

Keterlibatan militer dalam korporasi dimulai tahun 1958 ketika perusahaan-perusahaan Belanda dapat direbut dan kemudian dikelola sebagai perusahaan milik negara. Beberapa perusahaan tersebut pada masa Orde Baru dikendalikan oleh militer, Devisi Diponegoro yang dipimpin oleh Soeharto telah terlibat dalam bidang pertanian dan pelayaran. Namun pengelolaan yang tidak baik membuat perusahaan-perusahaan tersebut tidak bisa berkembang, apalagi menghasilkan keuntungan. Hanya satu perusahaan yang memiliki hubungan dengan militer yang bertahan dan bahkan berkembang yakni perusahaan minyak. Pengelolaan perusahaan di tangan militer tersebut menjadi titik mula timbulnya ketamakan dan korupsi. Sebagai contohnya perusahaan seperti Pertamina, BULOG, dan Berdikari, ketiganya merupakan perusahaan-

Penguasa (Bantul : LKiS Yogyakarta, 2006), hlm 3.

¹⁵Edy Herry Pryhartoro, *Korupsi dalam Perspektif Teori Sosial Kontemporer* (Depok : Spasi Media, 2016), hlm tidak dicantumkan.

¹⁶Syamsuddin Haris dan Reza Sihbudi, *Menelaah Kembali Format Politik Orde Baru*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 1995), hlm 99.

perusahaan milik negara yang dikelola oleh beberapa jenderal kelas atas seperti Soeharto dan Ibnu Sutowo bersama dengan kapitalis Cina dan pribumi seperti Salim, Parjogo Pangestu, Bob Hasan, dll.

2. Pembentukan Lembaga Spri dan Aspri

Belajar dari pemerintahan sebelumnya, Soeharto menyadari sepenuhnya bahwa untuk membangun pemerintahan yang stabil dibutuhkan keseimbangan dalam bidang politik, ekonomi, dan juga keamanan untuk melanggengkan kekuasaannya.¹⁷ Oleh karena itu, sekitar bulan Juli atau Agustus 1966, berselang 5 bulan setelah Soeharto menduduki jabatan kepresidenan, Soeharto membentuk Staf Pribadi “Spri”¹⁸, dimana 6 orang berasal dari perwira tinggi AD, dan 2 orang berasal dari kalangan sipil. Staf Pribadi secara luas dipandang sebagai “pemerintah bayangan” yang memiliki kekuasaan lebih besar daripada kabinet, terutama dalam penyusunan kebijakan. Staf Pribadi memiliki peran besar dalam menentukan kebijakan Presiden, walaupun Staf Pribadi tidak memiliki jabatan resmi yang tertulis, namun manuver dan peran mereka lebih signifikan daripada kabinet.¹⁹ Spri dapat dikatakan sebagai “pembisik” bagi Soeharto, hal tersebut diakui sendiri oleh Soeharto diaman ia menyatakan bahwa, “Saya membutuhkan bantuan dari asisten-asisten yang saya percayai untuk menghadapi berbagai persoalan, sebab itu saya didampingi oleh beberapa staf pribadi”.²⁰ Selanjutnya, para anggota Spri tersebut bertanggung jawab dalam masalah keuangan atau ekonomi, politik, intelijen dalam dan luar negeri, persoalan kesejahteraan sosial, masalah-masalah pemilu, juga dengan “masaah umum” dan “masalah khusus”.²¹ Pembentukan Spri dan Aspri digunakan untuk menjaga kepentingan kelompok-kelompok tertentu dari jangkauan publik. Tentu saja institusi tersebut menjadi alat untuk menutupi kebobrokan Soeharto dan kroni-kroninya dalam melanggengkan korupsi.

Sementara itu, yang menjadi masalah paling krusial adalah pinjaman yang diberikan Jepang diluar bantuan IGGI dalam pembentukan perusahaan minyak di Indonesia yang sepenuhnya dikontrol oleh Asisten Pribadi (Aspri) Presiden,

¹⁷A.Yogaswara, *Dalang Peristiwa 15 Januari 1974 (MALARI)*, (Yogyakarta : Media Presindo, 2009), hlm 20.

¹⁸ Michael Malley, “Soedjono Hoemardani and Indonesian-Japanese Relation 1966-1974”, dalam *Jurnal INDONESIA* (Ithaca: Cornell University, 1989), hlm 47

¹⁹David Jenkins, *Soeharto dan Barisan Jenderal ORBA : Rezim Militer Indonesia 1975-1983*, hlm 27.

²⁰ G. Dwipayana dan Ramadhan K.H, *Soeharto : Pikiran, Ucapan, dan Tindakan saya*, (Jakarta : PT.Citra Lamtoro Gung Persada, 1989), hlm 179.

²¹David Jenkins, *Soeharto dan Barisan Jenderal ORBA : Rezim Militer Indonesia 1975-1983*, hlm 28.

dalam hal ini termasuk Soedjono Hoemardani dan Ali Moertopo.²² Hal tersebut menimbulkan suatu kecurigaan dari masyarakat bahwa dibalik kerjasama dengan Jepang, ada praktik-praktik kotor yang dilakukan oleh Pemerintah, dalam hal ini adalah Soeharto dengan pejabat-pejabat lingkaran dalamnya. Apalagi posisi Soedjono adalah pengawas tidak resmi terhadap penanaman modal Jepang di Indonesia.²³ Kebenaran terhadap fakta bahwa adanya bisnis yang dilakukan oleh Soeharto dengan kroninya menjadi inspirasi bagi pejabat-pejabat militer lainnya, yang kebanyakan adalah rekan Soeharto untuk melakukan hal yang serupa. Dalam salah satu artikel yang ditulis oleh David Jenkins “*After Marcos, now for the Soeharto billions*” menyatakan bahwa harta yang ditimbun oleh keluarga Soeharto dengan asosiasi bisnisnya berkisar antara US\$2-3 juta dimana kekayaannya tersebut diperoleh dari eksploitasi modal pemerintah dan hasil kerjasamanya dengan pengusaha Cina.²⁴

3. Arah Kebijakan Politik dan Ekonomi Baru

Kesadaran terhadap keterbatasan kemampuan dalam negeri terutama dalam hal modal, teknologi, dan ilmu pengetahuan maka satu-satunya cara yang dapat ditempuh adalah dengan menerapkan kebijakan politik luar negeri yang lebih terbuka dengan dunia internasional dengan cara membina hubungan kerjasama yang lebih akomodatif dengan negara-negara lain,²⁵ khususnya negara kapitalis Barat, sesuai dengan konsep interdependensi internasional.²⁶ Kerjasama yang dibangun oleh pemerintah baik di tingkat regional maupun internasional dipandang dapat memperbaiki citra Indonesia di dunia internasional sehingga kemungkinan besar dapat menarik bantuan dan investasi asing.

Pada masa awal pemerintahan Orde Baru, Soeharto berusaha untuk mendapatkan bantuan ekonomi dalam rangka untuk menstabilkan kondisi politik di Indonesia yang carut marut setelah kudeta gagal yang dilakukan oleh PKI. Pemerintah menyadari bahwa untuk menstabilkan kondisi politik harus dilakukan rehabilitasi ekonomi. Oleh karena itu, Soeharto kemudian mengirim para teknokrat di Bappenas yang diketuai Menteri Ekonomi dan Keuangan,

²²Michael Malley, “*Soedjono Hoemardani and Indonesian-Japanese Relation 1966-1974*”, hlm 56.

²³A.Yogaswara, *Dalang Peristiwa 15 Januari 1974 (MALARI)*, hlm 32.

²⁴“*A sensitive topic, however you approach it*”, Canberra Times, 20 September, 1986.

²⁵*Ibid.*

²⁶Konsep tersebut menyatakan bahwa suatu negara membutuhkan bantuan atau dukungan negara yang lebih maju untuk mengatasi desakan ekonomi dalam negeri. Konsep Interdependensi Internasional di dorong oleh adanya desakan ekonomi dalam negeri yang hanya bisa dipenuhi dengan melalui interaksi ekonomi antar bangsa.

Sultan Hamengku Buwono IX untuk mendekati Barat dan Jepang. Baik Barat maupun Jepang sendiri menyadari bahwa tanpa bantuan dari mereka, Indonesia tidak akan bisa bertahan. Hal tersebut kemudian membuat negara-negara Barat dan Jepang bermaksud untuk mengorganisir negara-negara donor untuk membantu Indonesia. Oleh karena itu, pada tahun 1967, enam negara pendonor bertemu untuk membentuk *Inter-Governmental Group on Indonesia*. (IGGI) dimana anggota negara pendonor tersebut antara lain, Australia, Jerman, Jepang, Belanda, Inggris, dan Amerika Serikat Dengan penunjukan Belanda sebagai ketua IGGI. Diantara negara-negara pendonor tersebut, Jepang dan Amerika adalah negara pendonor terbesar.²⁷ Bantuan keuangan yang didapatkan oleh Indonesia tidak hanya dari dana IGGI, namun pemerintah Indonesia juga mendapatkan bantuan dana (hutang) dari organisasi internasional lainnya seperti IMF, Bank Dunia, dan IFC. Lembaga tersebut memberikan bantuan keuangan kepada Pemerintah Indonesia namun, bantuan yang diterima kemudian disalahgunakan, bantuan tersebut tidak dipergunakan untuk membantu rakyat miskin atau dengan kata lain dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat, namun sebaliknya bantuan tersebut dipergunakan oleh presiden dan kroni-kroninya untuk membiayai perusahaan-perusahaan besar Cina, perusahaan negara, dan bahkan dipergunakan oleh presiden dan kroninya untuk membiayai kepentingan bisnis pribadi mereka.²⁸ Dengan demikian, pemberian bantuan asing internasional menjadi faktor yang mempertinggi tingkat korupsi Orde Baru.

Arah kebijakan ekonomi baru yang diberlakukan pada masa awal pemerintahan Orde Baru adalah diberlakukannya undang-undang Penanaman Modal Asing dan Dalam Negeri pada tahun 1967 dan 1968 telah membuka kesempatan bagi investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia, tidak terkecuali bagi Jepang dan Amerika Serikat yang memiliki ketertarikan terhadap prospek industri minyak di Indonesia. Sehingga wajar ketika undang-undang PMA diberlakukan, banyak investor dari kedua negara tersebut membajiri investasi-investasi dalam sektor perminyakan di Indonesia. Kebijakan terkait Penanaman Modal Asing juga membuat Indonesia menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang memberikan sebanyak 44 konsesi kepada kontraktor asing dimana sebagian besar konsensi dimiliki oleh kontraktor Jepang.²⁹ Selain itu, kebijakan tersebut juga telah meningkatkan fungsi negara

²⁷Leo Suryadinata, *Politik Luar Negeri Orde Baru dibawah Soeharto*, (Jakarta : LP3ES, 1998), hlm 177.

²⁸Rajeswary Ampalavanar Brown, *Op.Cit.*, hlm 954.

²⁹Setidaknya ada tiga perusahaan besar Jepang yang memiliki saham di Pertamina diantaranya yakni, Kyushu, Japex, dan NOSODECO (oecf, Mitsui, Japex, Nipon, Masubeni) dimana tiga perusahaan tersebut berada di semua lokasi kilang minyak yang tersebar di Indonesia.(Robert.F. Ichord Jr, *Southeast Asia and the World*

dalam hal pemberian insentif, proteksi, monopoli, dan berbagai macam campur tangan lainnya. Hal tersebut menyebabkan semakin dekatnya hubungan antara pemerintah dengan pengusaha. Semakin dekatnya hubungan antara pemerintah dengan swasta (pengusaha) mengakibatkan ketergantungan pemerintah terhadap modal swasta. Hal itulah yang menjadi titik permulaan berkembangnya benih-benih korupsi di era Orde Baru. Ketergantungan pemerintah terhadap modal asing dan bantuan luar negeri pada akhirnya akan dipergunakan untuk membiayai proyek-proyek pribadi para pejabat negara dalam hal ini adalah Soeharto dan kroni-kroninya. Kebijakan PMA yang memberikan keleluasaan bagi investor asing untuk masuk ke Indonesia secara tidak langsung mengakibatkan munculnya kapitalis-kapitalis baru yakni, para konglomerat-konglomerat dengan omset dan kekayaan yang sangat besar. Sebaliknya membuat para pelaku pasar yang didominasi oleh pribumi hanya mengandalkan modal simpan pinjam dari koperasi. Gambaran tersebut terlihat dari banyaknya konglomerat yakni sebanyak 300 konglomerat, dimana konglomerat pribumi hanya berjumlah 35 dari jumlah keseluruhan.

KESIMPULAN

Berkembangnya Korupsi Orde Baru tidak terlepas dari terbentuknya kroni-kroni Soeharto di masa awal pemerintahannya. Kroni Soeharto tersebut merupakan orang-orang kepercayaan Soeharto yang melibatkan keluarga inti Soeharto, kolega Soeharto di dinas militer, maupun kerabat dekat Soeharto. Militer memiliki pengaruh kuat dalam menumbuh-kembangkan korupsi Orde Baru dikarenakan kebijakan Dwifungsi ABRI yang memberikan keleluasaan bagi militer untuk berperan tidak hanya di bidang pertahanan dan keamanan negara (Hankam), namun juga peran sipil seperti ekonomi, sosial, dan politik. Dengan fungsinya tersebut, militer dapat memonopoli semua peran, hal tersebut menjadi akar terjadinya penyimpangan (korupsi). Korupsi yang terjadi pada waktu itu dapat diklasifikasikan menjadi 3 yakni, korupsi dikalangan keluarga inti Soeharto (*Soeharto Family*), dikalangan militer, dan kapitalis Cina. Sementara itu setidaknya ada 3 faktor yang melatarbelakangi terjadinya korupsi yakni, kebijakan Dwifungsi ABRI, pembentukan lembaga Spri maupun Aspri, dan terakhir adalah arah kebijakan politik dan ekonomi baru Orde Baru.

Oil Crisis 1973, dalam Jurnal ISEAS, (1974), hlm 36.)

Reference

Buku :

Arnoldt, H.W., *Pembangunan dan Pemerataan Indonesia di Masa Orde Baru* (Jakarta : LP3ES, 1983)

Aspinall, Edward dan Greg Fealy, *Soeharto's New Order and Its Legacy* (Sydney : ANU Press, 2010)

Dwipayana, G dan Ramadhan K.H, *Soeharto : Pikiran, Ucapan, dan Tindakan saya*, (Jakarta : PT.Citra Lamtoro Gung Persada, 1989)

Jenkins, David *Soeharto dan Barisan Jenderal ORBA : Rezim Militer Indonesia 1975-1983*, (Depok : Komunitas Bambu, 2010)

Haramain, A. Malik, *Gus Dur, Politik, dan Militer*, (Bantul: LKIS Yogyakarta, 2004)

Haris, Syamsuddin dan Reza Sihbudi, *Menelaah Kembali Format Politik Orde Baru*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 1995)

Herry Pryhartoro, Edy , *Korupsi dalam Perspektif Teori Sosial Kontemporer* (Depok : Spasi Media, 2016)

Junus Aditjondro, George, *Korupsi Kepresidenan : Reproduksi Oligarki Berkaki Tiga Istana, Tangsi, dan Partai Penguasa* (Bantul : LKiS Yogyakarta, 2006)

Suryadinata, Leo, *Politik Luar Negeri Orde Baru dibawah Soeharto*, (Jakarta : LP3ES, 1998)

Jurnal :

Ampalavanar Brown, Rajeswary , *Indonesian Corporations, Cronysm, and Corruption* dalam *Modern Asian Studies* (40) (4), 2006.

Malley, Michael “*Soedjono Hoemardani and Indonesian-Japanese Relation 1966-1974*”, dalam *Jurnal INDONESIA* (Ithaca: Cornell University, 1989)

Robert.F. Ichord Jr, *Southeast Asia and the World Oil Crisis 1973*, dalam *Jurnal ISEAS*, (1974)

Surat Kabar :

“*A sensitive topic, however you approach it*”, *Canberra Times*, 20 September, 1986.

